



Implementasi Kebijakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Koili Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai

Annisa Cahyani Kartika^{1*}, Rustam Tohopi², Yacob Noho Nani³

¹⁻³Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jeonunannisa@gmail.com

Abstract. *The problem addressed in this research is the suboptimal implementation of the Community-Based Drinking Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Koili Village. The objective of this research is to analyze the implementation of the PAMSIMAS Program based on Donald P. Warwick's policy implementation theory, which includes organizational capacity, information, support, and the distribution of potential resources. This research employs a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from the local government, village officials, PAMSIMAS management, and community members, both beneficiaries and non-beneficiaries. The findings indicate that the PAMSIMAS Program has been implemented; however, it has not yet been fully optimized. Organizational capacity and information dissemination have been implemented, but limitations remain in implementers' capacity and in the equitable distribution of information. Support from the village government and the community is relatively good; nevertheless, coordination and the distribution of potential resources still need improvement. This research recommends that future researchers examine the implementation of PAMSIMAS on a broader regional scale and incorporate a more in-depth analysis of sustainability and community participation.*

Keywords: *Clean Water Supply; Implementation; Koili Village; PAMSIMAS; Policy Implementation.*

Abstrak. Permasalahan dalam studi ini adalah belum optimalnya implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Koili. Tujuan dari studi ini untuk menganalisis implementasi Program PAMSIMAS berdasarkan teori implementasi kebijakan Donald P. Warwick yang meliputi kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pemerintah daerah, aparatur desa, pengelola PAMSIMAS, dan masyarakat penerima manfaat maupun yang tidak menerima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PAMSIMAS telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Kemampuan organisasi dan penyampaian informasi sudah dilaksanakan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas pelaksana dan pemerataan informasi. Dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat cukup baik, namun koordinasi dan pembagian potensi masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan agar peneliti selanjutnya mengkaji implementasi PAMSIMAS dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menambahkan aspek keberlanjutan dan partisipasi masyarakat secara lebih mendalam.

Kata Kunci: Desa Koili; Implementasi Kebijakan; Implementasi; PAMSIMAS; Penyediaan Air Bersih.

1. LATAR BELAKANG

Desa memainkan peran penting dalam kemajuan, namun kemajuan komunitas ini tetap menjadi aspek kunci yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Untuk memenuhi segala kepuasan masyarakat terhadap negara, maka sangat diperlukan untuk selalu memperkuat pembangunan desa. Pembangunan desa merujuk pada cara dan strategi yang disusun oleh negara, baik oleh pihak pemerintah maupun komunitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan desa. Pembangunan desa merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menangani isu-isu sosial dan ekonomi yang ada (Jauhari & Syamsudin, 2023).

Kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan melalui pembangunan desa yang berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, aliran listrik, dan air bersih. Air bersih ialah kebutuhan krusial yang menopang aktivitas keseharian serta menghadirkan bermacam manfaat. PERPRES No 37 Tahun 2023 mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air menetapkan arah pengelolaan sumber daya air di Indonesia guna memastikan keberlanjutan, keadilan, serta efisiensi.

Penyaluran air bersih wajib merata bagi masyarakat. UU RI Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air Pasal 6 mengemukakan bahwasannya negara bertanggung jawab menjamin akses air guna memenuhi kebutuhan dasar, menopang kehidupan menyeluruh serta higienis, melalui kuantitas cukup, mutu baik, keamanan terjamin, berkelanjutan, serta terjangkau. Pemerintah lalu melaksanakan Program PAMSIMAS guna menghadirkan fasilitas terstruktur dalam distribusi air bersih serta sanitasi layak di pedesaan.

Berlandaskan Donald P. Warwick dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwasannya pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh aspek krusial, mencakup kemampuan organisasi, informasi, dukungan, serta pembagian potensi. Studi terdahulu yang relevan dengan topik ini yaitu, studi oleh Andry Kristanto (2016) penerapan program penyediaan air minum serta sanitasi berbasis masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Blora dapat dikatakan efektif jika dilihat dari pemanfaatan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, informasi, dan wewenang. Komunikasi pada pelaksanaan program ini juga berjalan dengan baik, yang tercermin dari saluran komunikasi yang tersedia, konsistensi komunikasi, serta kejelasan pesan yang disampaikan.

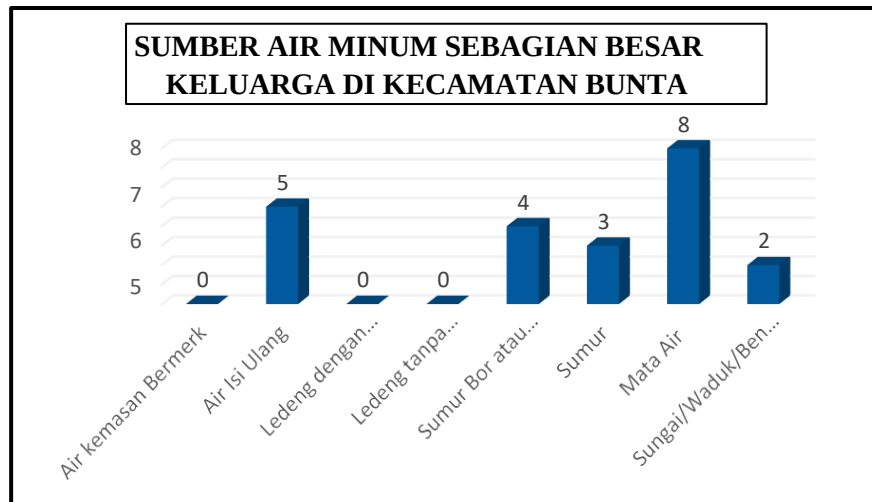
Studi oleh Ardiyansyah et al. (2022) implementasi kebijakan program Penyediaan Jaringan Air Bersih di Desa Kelungkung secara keseluruhan telah terlaksana, meskipun tidak seluruh warga dapat menikmati manfaat program tersebut. Hal ini disebabkan karena material yang digunakan dalam program saat ini belum memenuhi standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, baik pemerintah maupun anggota masyarakat terus berupaya mengoptimalkan distribusi air bersih untuk memberikan kepastian bahwasannya semua rumah tangga mempunyai akses pada air bersih. Upaya ini terlihat dari partisipasi aktif masyarakat yang turut serta dalam memperlancar jaringan air bersih melalui kerjasama serta saling membantu saat menjalankan program ini, oleh sebab itu Jaringan Air Bersih dapat dipakai pada semua masyarakat Desa Kelungkung. Selanjutnya studi oleh Miojo et al. (2022) penerapan program penyediaan air minum serta sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Talikuran belum sepenuhnya efektif. Dalam mengimplementasikan program ini sudah dilakukan penempatan yang tepat dan tanggung jawab kepada masing-masing staf akan tetapi masih saja terdapat

kelemahan dalam pelaksanaannya. Lemahnya potensi yang dimiliki disebabkan ketidakmampuan aparat pemerintah Kelurahan Talikuran didalam melaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi karena mereka tidak memiliki keahlian di bidang itu.

Ketersediaan terhadap air bersih yang aman dan berkualitas menjadi sebuah prioritas bagi pemerintah daerah untuk selalu dikembangkan sampai ke desa-desa dan tersalurkan kepada masyarakat. Membangun sistem distribusi yang efektif dan akses yang lebih baik ke sumber air dapat menjaga kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Namun, ada berbagai tantangan yaitu, keterbatasan akses terhadap sumber air, kurangnya dana dan sumber daya, serta kapasitas manajerial yang sangat terbatas. Akibatnya, tidak seluruh kalangan masyarakat mendapatkan akses air bersih dengan kualitas yang diperlukan untuk penggunaan sehari-hari.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, akses air bersih dijadikan sebuah masalah yang krusial di masyarakat, khususnya di masyarakat desa. Salah satu wilayah di Kabupaten Banggai yang masih menghadapi masalah penyediaan air bersih adalah Desa Koili di Kecamatan Bunta. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih optimal dalam menyediakan air bersih, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pasal 17 (3), ditugaskan untuk melaksanakan program dan kegiatan sumber daya air sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 32 ayat (2) mengemukakan bahwasannya Kepala Seksi Air Bersih serta Sanitasi Lingkungan berkewajiban melaksanakan survei, menetapkan lokasi pembangunan sarana sesuai regulasi, serta memantau perencanaan teknis. Hal ini juga bertanggung jawab atas pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan air bersih dan sanitasi lingkungan sesuai ketentuan berlaku.

Desa Koili ialah aspek dari 18 desa di Kecamatan Bunta melalaui jumlah penduduk 483 jiwa (166 KK) dan luas wilayah 12.400 m². Desa ini berjarak 462 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, 102 km dari ibu kota kabupaten, serta 31 km melalui ibu kota kecamatan. Topografinya didominasi perbukitan dan pegunungan (85%) dengan kemiringan 5–20%, sehingga sumber air permukaan dan mata air dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut mendukung kelancaran aliran air untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan kegiatan ekonomi, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan lingkungan masyarakat.



Sumber: Pemutakhiran Potensi Desa 2020, BPS Kabupaten Banggai

Gambar 1. Sumber air minum sebagian besar keluarga di Kecamatan Bunta.

Berdasarkan data di atas, masyarakat Kecamatan Bunta lebih mengandalkan sumber air alami seperti mata air, air isi ulang, dan sumur bor atau pompa. Secara umum, sumber air yang paling sering memberikan manfaat mampu mencukupi kebutuhan air bersih biasanya berasal dari mata air, sumur bor, atau bahkan pompa. Meskipun mata air dan sumur bor menjadi sumber air utama, kualitas air dari sumber-sumber ini tidak selalu terjamin. Tanpa pengolahan yang memadai, air dari sumber alami seperti mata air, sumur, atau sungai berisiko terkontaminasi oleh bakteri, limbah, atau zat kimia berbahaya.

Program PAMSIMAS dilaksanakan di Desa Koili sejak Tahun 2019. Namun pelaksanaan program PAMSIMAS ini memiliki beberapa masalah. Adapun masalah yang saat ini dihadapkan saat penyediaan air bersih di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, ialah adanya hambatan saat memberikan kebutuhan air bersih yang penting saat penggunaan keseharian masyarakat karena dalam pelaksanaannya, masih belum berjalan secara merata dimana Desa Koili memiliki jumlah rumah 114 rumah dan telah mendapatkan sambungan air bersih, tetapi pengguna air bersih hanya 82 rumah saja, maka masih ada 30 rumah yang tidak mendapati akses air bersih, serta 2 rumah yang tidak mendapatkan sambungan pipanisasi.

Isu tersebut melandasi sasaran kajian ini, yakni menganalisis implementasi kebijakan Program PAMSIMAS di Desa Koili, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, berlandaskan aspek kemampuan organisasi, informasi, dukungan, serta pembagian potensi.

2. KAJIAN TEORITIS

Administrasi Publik

Administrasi publik, seperti yang dijelaskan oleh Siagian dalam Tahir (2020) didefinisikan sebagai seluruh langkah sistematis yang melibatkan kerja sama antar dua individu ataupun lebih yang berlandaskan pada logika menentukan guna tercapainya sasaran atau target yang sudah ditetapkan.

Kebijakan Publik

Berlandaskan Thomas R. Dye dalam Tahir (2020) kebijakan publik ialah sesuatu yang diambil pada pemerintah guna bertindak ataupun tidak bertindak. Dye menjelaskan bahwasannya ketika pemerintah memutuskan akan bertindak, wajib mempunyai sasaran yang mendasarinya. Kebijakan publik mencakup seluruh aktivitas pemerintah, sehingga tidak hanya sekadar mengekspresikan keinginan atau tujuan otoritas atau pejabat pemerintah.

Menurut Carl Friedrich dalam Wahab (2016) menjelaskan sebuah kebijakan terdiri dari serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan pemerintah dalam situasi tertentu. Proses ini melibatkan pertimbangan berbagai tantangan yang dapat terjadi dan juga mengenali peluang yang mungkin terjadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau mencapai hasil yang menguntungkan.

Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut Nugroho yang dikutip Pasolong (2019), kebijakan publik dapat dikategorikan pada tiga ciri yang mempunyai perbedaan, yakni: (1) Kebijakan makro, mengacu pada peraturan atau pedoman yang luas yang tidak bersifat spesifik dan berdampak pada lingkungan ekonomi yang lebih besar. (2) Kebijakan meso, kebijakan tingkat menengah yang berfungsi untuk memperjelas atau mengatur implementasi kebijakan, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri, peraturan yang ditetapkan oleh gubernur, peraturan yang ditetapkan oleh bupati, dan perintah dari walikota. (3) Kebijakan mikro, yaitu kebijakan bersifat mengawasi pelaksanaan atau penerapan kebijakan-kebijakan.

Pengertian Implementasi

Implementasi ialah tahap penerapan rencana kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan sasaran tertentu. Pelaksanaan seperti yang dikemukakan oleh Pariata Westra dalam Asiva Noor Rachmayani (2015) adalah upaya atau inisiatif yang dijalankan untuk semua kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan ini, setelah dikembangkan dan ditetapkan, dilengkapi dengan semua sumber daya yang diperlukan dan detail siapa yang akan melaksanakannya, kapan pelaksanaannya akan dimulai dan berakhir, serta metode pelaksanaannya.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tindakan di mana keputusan atau rencana mengenai kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau organisasi terkait yang membuat kebijakan. Implementasi kebijakan yang dinyatakan Suharno (2008) merujuk pada upaya pemerintah untuk memenuhi kewajiban fundamentalnya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Nani et al. (2024) implementasi kebijakan memiliki dasar hukum dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perintah eksekutif, atau jenis lainnya yang diwujudkan dalam program-program yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah spesifik yang menjadi fokus kebijakan tersebut.

Donald P. Warwick mengemukakan empat faktor penting dalam implementasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan organisasi, dalam indikator ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas yang harus dilakukan untuk diselesaikan. Kemampuan organisasi diantaranya ada tiga, yang meliputi:
 - 1) Kemampuan teknis.
 - 2) Kemampuan menjalin ikatan dengan organisasi lain yang bergerak pada bidang sejenis melalui koordinasi antar instansi terkait.
 - 3) Melakukan peningkatan pelayanan melalui penguatan SOP guna dijadikan panduan tata kerja pada pelaksanaan kebijakan.
- b. Informasi, indikator ini mencakup data dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ini termasuk informasi tentang kebutuhan masyarakat, kondisi yang ada, dan cara terbaik untuk mencapai tujuan kebijakan.
- c. Dukungan, hal ini meliputi dukungan melalui bermacam pihak berkepentingan, yakni pemerintah, masyarakat, serta organisasi lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dukungan yang kuat dari pemangku kepentingan dapat memperlancar proses implementasi. Sebaliknya, kurangnya dukungan atau resistensi dari masyarakat atau pihak lain dapat menghambat keberhasilan kebijakan.
- d. Pembagian potensi, pembagian potensi merujuk pada distribusi tanggung jawab dan sumber daya di antara bermacam pihak yang berperan saat pelaksanaan kebijakan. Pembagian yang adil dan efektif dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak. Jika tanggung jawab tidak dibagi dengan jelas, hal ini dapat menyebabkan kebingungan, konflik, dan kegagalan saat implementasi.

Air Bersih dan Sanitasi

Dalam pengelolaan sumber daya air, telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, bahwa air permukaan mengacu pada sumber air yang terlihat di permukaan bumi tanpa memerlukan alat khusus untuk pengamatan (Ardi isnanto, 2023). Sementara itu, Umam dalam Rolia et al. (2023) World Health Organization atau WHO mendefinisikan air bersih sebagai air yang digunakan oleh individu untuk keperluan pribadi, yang mencakup minum, persiapan makanan, dan penggunaan domestik lainnya.

Pengertian Program PAMSIMAS

PAMSIMAS ialah program pemerintah Indonesia yang dirancang guna memperluas akses masyarakat kepada layanan air bersih serta sanitasi yang layak.

Tujuan Program PAMSIMAS

Tujuan utama dari PAMSIMAS ialah melakukan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air bersih serta sanitasi layak. PAMSIMAS juga diarahkan guna memperluas akses layanan air serta sanitasi yang andal bagi kelompok terabaikan, terutama di wilayah pedesaan serta pinggiran kota dengan keterbatasan ekonomi.

Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan berperan penting dalam kesehatan masyarakat. Penyediaan air bersih adalah proses pengambilan, dan distribusi air bersih yang baik begitu penting guna kesehatan, sanitasi, serta kualitas hidup masyarakat. Proses penyediaan air bersih melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengambilan air dari sumber air, pengolahan untuk memastikan kualitas, hingga distribusi ke konsumen.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai metode pendekatan kualitatif dengan ciri khusus alami guna sumber informasi utama. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta terkait fenomena yang diteliti secara mendalam di Desa Koili Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kemampuan Organisasi

Berlandaskan kajian ini didapatkan bahwa saat penerapan program PAMSIMAS ini masih ada permasalahan yang muncul seperti kendala perbaikan saluran pipanisasi yang rusak karena kurangnya dana yang diberikan. Kemudian juga mekanisme koordinasi yang belum

kondusif, serta material yang masih belum memadai. Hal ini mempengaruhi jumlah debit air yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Jumlah debit air pada sumber mata air dalam program PAMSIMAS sebesar 6,39 liter/detik. Setelah dilakukan pembangunan sarana prasarana berupa jaringan perpipaan, debit air yang sampai pada ujung pipa atau titik pelayanan kepada masyarakat menjadi yakni 0,47 liter/detik. Perbedaan debit tersebut menunjukkan adanya proses pengendalian dan penyesuaian aliran air dalam sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat. Debit pada mata air merupakan debit alami yang bersumber langsung dari kondisi hidrologis sumber air, sedangkan debit pada ujung pipa merupakan debit distribusi yang dipengaruhi oleh perencanaan teknis jaringan, terutama diameter pipa yang digunakan.

Informasi

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penyebaran informasi di Desa Koili sudah sangat tepat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pemerintah daerah sendiri yang menyatakan bahwa mereka pastinya melakukan sosialisasi antara pemerintah daerah, desa, kecamatan, dan masyarakat. Tentunya hal ini meliputi informasi terkait dengan tujuan dan manfaat program, pelatihan khusus untuk pengelola air bersih, transparansi informasi, dan tentunya umpan balik dari masyarakat. Hal ini juga didukung oleh pernyataan lainnya yang juga mengatakan bahwa masyarakat ikut serta dalam sosialisai tersebut untuk keberlangsungan program serta pelaksanaannya. Realitanya, di Desa Koili, penyampaian informasi tersebut masih belum berjalan dengan kondusif. Beberapa masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna air bersih, termasuk kewajiban dalam pemeliharaan sarana dan prasarana dan sanitasi. Kurangnya informasi yang berkelanjutan ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program masih relatif rendah.

Dukungan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dukungan dalam penerapan program PAMSIMAS di Desa Koili cukup kuat. Dukungan pada hal ini menekankan pada partisipasi masyarakat, kontribusi finansial, tenaga kerja, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Temuan penelitian menggarisbawahi antusiasme masyarakat desa yang tinggi dalam mendukung keberlanjutan program dan dilanjut oleh dukungan pemerintah daerah. Namun, dalam realisasinya masih memerlukan peningkatan kebijakan yang berlanjut baik dari desa maupun desa untuk insentif pengurus dan pelatihan pemeliharaan agar keterlibatan mencapai tingkat optimal, sehingga program tidak hanya bertahan melalui dorongan data dan musyawarah tahunan tetapi juga menghasilkan *outcome* berkelanjutan seperti air bersih merata tanpa gangguan berulang yang melemahkan kepercayaan kolektif.

Pembagian Potensi

Temuan dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa mengenai pembagian potensi saat penerapan PAMSIMAS di Desa Koili, sedang sangat lemah sebab pembagian yang timpang dan tidak berkelanjutan. Pembagian potensi ini meliputi alokasi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan tanggung jawab. Temuan penelitian dari warga yang tidak menerima manfaat memperkuat ketimpangan ini karena aparat yang tidak memahami tugas akibatnya nihil karena tidak ada lagi pengawasan pasca-serah terima. Hal ini membuat implementasi suatu kebijakan belum efektif, sehingga sebagian warga bertahan dengan sarana air bersih yang terbatas. Pembagian potensi dalam pelaksanaan program PAMSIMAS memerlukan reformasi mendesak melalui pendanaan ADD untuk upah dan ekspansi jaringan yang lebih luas agar terdistribusikan secara merata, serta komunikasi yang lebih kondusif baik pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat setempat supaya tidak timpang seperti sekarang di mana hanya sebagian rumah yang mendapatkan akses air bersih, sementara sisanya bergantung pada sumber air lainnya, sehingga program tidak hanya bertahan pasca-2019 tapi mencapai *outcome* jangka panjang dengan pembagian potensi yang adil dan responsif terhadap keluhan debit air musiman.

Pembahasan

Kemampuan Organisasi

Berlandaskan hasil kajian ini, kemampuan organisasi saat pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Koili tidak terlaksana secara maksimal. Keadaan ini mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pendistribusian air bersih kepada masyarakat secara merata, meskipun program telah berjalan sejak tahun 2019. Secara struktural, pelaksanaan program PAMSIMAS di Desa Koili telah melibatkan pemerintah desa dan kelompok pengelola air bersih. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama. Pengelola air bersih belum sepenuhnya memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengelola jaringan pipanisasi dan melakukan perawatan sarana air bersih, sehingga sering terjadi kerusakan pipa dan gangguan distribusi air ke rumah-rumah warga.

Dalam perspektif teori Donald P. Warwick, kemampuan organisasi yang lemah akan berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang cukup serta memenuhi kualifikasi mendukung implementasi kebijakan agar tepat serta efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak bisa dijalankan, pelayanan prima tidak terwujud, serta regulasi yang tidak rasional tidak tersusun secara maksimal (Hintalo et al., 2024).

Temuan di Desa Koili menunjukkan bahwa meskipun organisasi pelaksana telah dibentuk, namun kapasitasnya masih perlu diperkuat agar mampu menjalankan program secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan organisasi menjadi kebutuhan mendesak dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Koili. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui meningkatnya sejumlah sumber daya manusia, penguatan sistem pengelolaan, serta ketersediaan sarana serta prasarana yang baik guna mendukung kelancaran distribusi air bersih kepada masyarakat. Pernyataan yang disampaikan oleh (Abdussamad et al., n.d.) Kajian Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai memperlihatkan bahwasannya sumber daya sangat krusial, meliputi ketersediaan staf yang cukup, kompetensi teknis yang memadai, serta wewenang dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas.

Informasi

Hasil studi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme program PAMSIMAS, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna air bersih. Informasi mengenai jadwal distribusi air, perawatan jaringan pipanisasi, serta penanganan gangguan air belum tersampaikan secara merata kepada seluruh warga desa. Kurangnya informasi juga terlihat dari belum tersedianya data yang akurat dan terkini mengenai kebutuhan air bersih masyarakat Desa Koili. Data terkait jumlah rumah yang terlayani, debit air, serta kondisi sarana prasarana masih bersifat terbatas, sehingga menyulitkan pemerintah desa dan pengelola dalam melakukan perencanaan dan evaluasi program.

Berlandaskan (Abdussamad et al., n.d.) informasi kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada pelaku kebijakan agar mereka memahami substansi, sasaran, arah, serta kelompok target. Dengan pemahaman tersebut, pelaku kebijakan bisa mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan secara tepat guna mencapai sasaran yang diupayakan.

Komunikasi merupakan aspek penentu keberhasilan kebijakan; ketiadaannya menghambat pelaksanaan kebijakan (Nani, Mozin, et al., 2024). Oleh sebab itu, pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Koili memerlukan melakukan peningkatan sistem informasi. Pemerintah desa serta pengelola air bersih harus menghadirkan informasi yang jelas, transparan, serta mudah dipahami agar implementasi program berjalan efektif serta sesuai sasaran.

Dukungan

Berlandaskan kajian ini, dukungan terhadap pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Koili sudah ada, namun belum sepenuhnya kuat dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah desa terlihat melalui keterlibatan dalam proses administrasi dan pengawasan program. Namun,

hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan dalam bentuk pendanaan dan pembinaan teknis masih terbatas. Hal ini menyebabkan pengelola air bersih kesulitan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan jaringan pipanisasi.

Dari sisi masyarakat, dukungan pada awal pelaksanaan program cukup tinggi, terutama saat pembangunan sarana air bersih. Namun, dalam tahap pengelolaan dan pemeliharaan, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat belum terinternalisasi secara berkelanjutan.

Berlandaskan teori Donald P. Warwick, kurangnya dukungan pemangku kepentingan bisa memicu resistensi serta menghambat implementasi kebijakan. Guna mencapai efektivitas, implementor tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, melainkan juga mempunyai kompetensi, kemauan, serta kecenderungan sikap positif dalam melaksanakan kebijakan (Akuba et al., 2024).

Kajian yang dilaksanakan Hintalo et al. (2024) implementor dengan sikap positif lebih cenderung menerapkan kebijakan sesuai harapan perumusannya. Namun, ketidaksepahaman antar implementor serta pengambil keputusan membuat proses implementasi tidak terarah serta membingungkan. Di Desa Koili, minimnya dukungan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan air bersih serta belum meratanya akses bagi masyarakat. Dukungan instansi tingkat kabupaten pun masih belum maksimal.

Pembagian Potensi

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian potensi dalam penerapan Program PAMSIMAS di Desa Koili tidak berjalan secara maksimal serta seimbang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian peran antara pemerintah desa, pengelola air bersih, dan masyarakat belum dirumuskan secara jelas. Pemerintah desa lebih banyak berperan dalam aspek administratif, sementara pengelola air bersih memikul tanggung jawab teknis yang cukup besar tanpa dukungan sumber daya yang baik.

Potensi sumber daya alam yakni ketersediaan sumber air sebenarnya cukup mendukung pelaksanaan program. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan pembagian tanggung jawab yang proporsional. Akibatnya, distribusi air bersih belum dapat menjangkau seluruh rumah tangga di Desa Koili. Dalam teori Donald P. Warwick, pembagian potensi yang tidak jelas dapat menimbulkan tumpang tindih peran dan menghambat kolaborasi antar pihak. Kondisi ini terlihat di Desa Koili, di mana kurangnya pembagian potensi secara adil berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi Program PAMSIMAS.

Masyarakat memiliki potensi sosial berupa gotong royong dan solidaritas belum dimanfaatkan secara maksimal dalam tahap pengelolaan program. Masyarakat lebih berperan sebagai penerima layanan, bukan sebagai mitra aktif dalam menjaga keberlanjutan program. Menurut Akuba et al. (2024) keberhasilan kebijakan ditentukan oleh partisipasi tiap elemen, termasuk masyarakat, ini dimaksudkan agar tujuan semula dari kebijakan ini dapat terealisasi dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan pembagian potensi yang lebih jelas dan proporsional antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Pembagian potensi yang adil dan efektif akan mendorong kolaborasi, meningkatkan tanggung jawab bersama, serta mendukung keberhasilan implementasi Program PAMSIMAS di Desa Koili.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Koili telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan akses air bersih, namun implementasinya belum optimal. Dari aspek kemampuan organisasi, struktur pengelola sudah terbentuk tetapi masih terbatas pada kapasitas SDM dan kemampuan teknis sehingga pengelolaan dan pemeliharaan belum maksimal. Dari aspek informasi, penyampaian terkait mekanisme, hak dan kewajiban, serta peran masyarakat belum merata dan berkelanjutan. Dari aspek dukungan, meskipun terdapat dukungan pemerintah desa dan masyarakat, pembinaan dan partisipasi aktif belum konsisten. Sementara itu, pembagian potensi menunjukkan peran dan tanggung jawab antar pihak belum proporsional, sehingga pemanfaatan sumber daya belum optimal dan tujuan program belum sepenuhnya tercapai secara efektif.

Saran

Berlandaskan simpulan dari kajian ini, peningkatan penerapan Program PAMSIMAS di Desa Koili perlu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola melalui pelatihan teknis dan pembinaan berkelanjutan, disertai penguatan sistem pengelolaan dan perencanaan pemeliharaan sarana air bersih. Kedua, perbaikan sistem penyampaian informasi yang dilakukan secara jelas, rutin, dan transparan agar masyarakat memahami pengelolaan program serta dapat berpartisipasi aktif. Ketiga, penguatan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat, baik dalam bentuk pendampingan teknis, pengawasan, maupun alokasi anggaran. Keempat, pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih proporsional serta optimalisasi potensi sumber daya melalui koordinasi dan kerja sama yang baik agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, J., Tui, F. P., & Kaku, O. B. (2023). Implementasi kebijakan penyaluran bantuan pangan non tunai di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. 2, 1–11.
- Akuba, A. M., Pakaya, R., Aneta, Y., Abdussamad, J., & Tantu, R. (2024). Implementasi kebijakan hewan lepas Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. 4(April).
- Ardi Isnanto, B. (2023). Evaluasi ketersediaan kebutuhan dan penanggulangan air bersih di Dusun Lokki Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. *Detikproperti*, 9, 119–121.
- Ardiyansyah, Amrullah, & Susanti, E. (2022). Implementasi kebijakan Pemerintah Desa Kelungkung tentang program penyediaan air bersih. 1(1), 71–81.
- Hintalo, S., Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi kebijakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. *PUBLIKA*, 10(1). <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16316>
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan pembangunan. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Kristanto, A., & S. (2016). Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Purwosari Kecamatan Blora. 1–23.
- Miojo, M., Pangkey, M., & Tulusan, F. (2022). Implementasi program pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(124), 57–62. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/44604/38852>
- Nani, Y. N., Mozin, S. Y., & Monoarfa, S. S. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone Bolango. 4(April).
- Nani, Y. N., Rustam, T., & Tui, F. P. (2024). *Kebijakan publik dalam perspektif pembangunan rumah layak huni* (Vol. 1). Penerbit Tahta Media. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/536>
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Rachmayani, A. N. (2015). Implementasi kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penganggulan Covid-19 di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Rolia, E., Oktavia, C., Rahayu, S. R., Fansuri, M., & Mufidah, M. (2023). Penyediaan air bersih berbasis kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air. *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi): Jurnal Program Studi Teknik Sipil*, 12(2), 155. <https://doi.org/10.24127/tp.v12i2.2594>

- Subarsono. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2008). *Prinsip-prinsip dasar kebijakan publik*. UNY Press.
- Tahir, A. (2020). *Administrasi publik good governance menuju sound government*. Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.